



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RENCANA KERJA
(RENJA)TAHUN
2024**

KATA PENGANTAR

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Biro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dititikberatkan pada Pengendalian Pembangunan Sumatera Barat. Reformasi yang mengarah kepada demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi dan *good governance* menyebabkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu berbenah diri untuk mengantisipasi perubahan zaman. Kejelasan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan dapat membawa *stakeholder* memasuki persaingan global dengan rasa percaya diri dan siap untuk bersaing.

Rencana Kerja Tahun 2024 adalah salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke depan. Pada dasarnya program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan Tahun 2024 merupakan salah satu cara dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi terhadap penyelenggaraan pengendalian pembangunan, namun diharapkan setidaknya dapat mengatasi beberapa isu/masalah mendesak yang dihadapi oleh Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu dukungan dan komitmen dari seluruh lini staf dan *stakeholder* lainnya kami harap dapat mendukung dan menjalin kerjasama kemitraan yang baik sehingga apa yang kita cita-citakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengendalian pembagunan yang efektif, efisien dan akuntabel dapat dicapai Tahun 2024.

Akhirnya kepada seluruh aparatur Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan diharapkan dapat mempedomani Rencana Kerja Tahun 2022 ini sebagai wujud transparansi dan arahan operasional dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembangunan.

Padang, Juli 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si
NIP. 19691113 199303 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum.....

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona.....

3.2.Tujuan dan Sasaran.....

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perencanaan. Dalam sistem pembangunan holistik, perencanaan merupakan bagian terpenting dalam penentuan arah, bentuk, pembiayaan, kebijakan serta prioritas pembangunan. Sebagai satu kesatuan, perencanaan dan pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif, akuntabel, transparan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsepsi ekonomis, efisien dan efektif. Keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan baik berdasarkan keruangan maupun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan perencanaan yang didasarkan ruang adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat Nagari/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Sementara itu berdasarkan waktu pelaksanaannya dikenal dengan Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM/Renstra OPD) dan Jangka Pendek (RKPD/Renja OPD). Dalam proses perencanaan selanjutnya, RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD digunakan oleh pemerintah/daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya dinyatakan bahwa Renja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

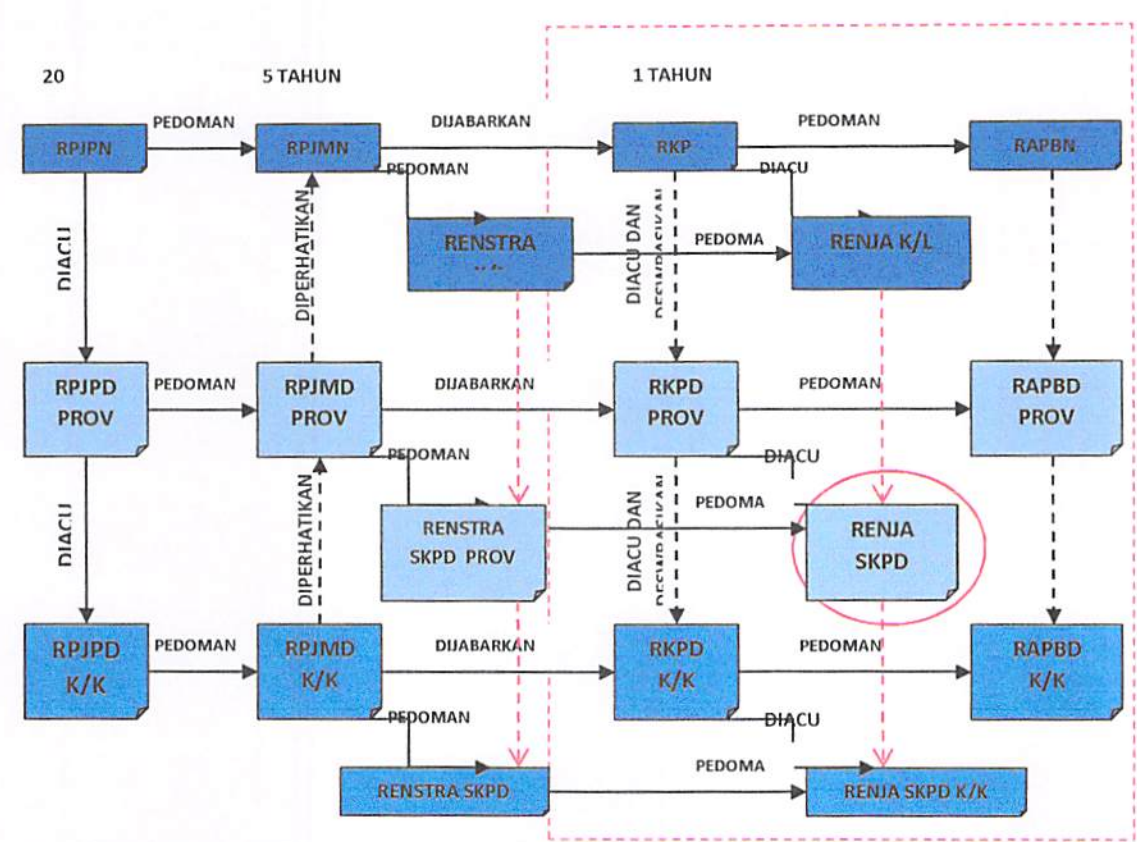
Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat memiliki arti strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD untuk memasukkan program/kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Renstra Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Agar Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dengan Renja Perangkat Daerah dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Hubungan antar dokumen perencanaan di tingkatan Pemerintah sampai Pemerintah Daerah

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKPD Daerah.

Proses penyusunan Renja Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana dalam peraturan tersebut dicantumkan beberapa aturan yang harus dipedomani dalam penyusunan Renja. Berdasarkan tata cara penyusunan Renja bahwa setiap OPD perangkat daerah harus membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah. Adapun Tim Penyusun Renja Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :118/KPTS/BAP/VII-2023
TANGGAL 10 JULI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2023 PADA BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | PENANGGUNG JAWAB | Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si | KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 2. | KETUA | ERICK KURNIAWAN, ST, MT | KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | SEKRETARIS | Dra. LAURA NURWINDA, M.Si | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 4. | KOORDINATOR KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN WILAYAH | ARDI MULYAN, S.Kom | KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN WILAYAH |
| 5. | KOORDINATOR KEPALA BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Ir. SUYANTI, M.Si | KEPALA BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN |
| 6. | KOORDINATOR KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH | FEBI FORTUNA, S.STP | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| 7. | ANGGOTA | PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | |
| 8. | ANGGOTA | PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERENCANA AHLI MUDA | |
| 9. | ANGGOTA | SELURUH STAF PELAKSANA | |

Untuk proses penyusunan Renja 2024 Biro Administrasi Pembangunan mengacu kepada Rentra 2021-2026 dengan berpedoman terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta terjadinya perubahan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-24-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan tata laksana organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
2. Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan di Sumatera Barat ;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023) mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun lalu, dan realisasi Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
4. Lampirkan Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan dengan Tabel T-C.32.

Namun mengingat Biro Administrasi Pembangunan tidak secara langsung melakukan penelaahan usulan dari masyarakat maka tidak dapat diuraikan didalam sub bagian ini.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program dan kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Table rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- a. Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan dikaitkan dengan target pencapaian Renstra serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dapat diperoleh bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang berdasarkan realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 anggaran Biro Administrasi Pembangunan sebesar Rp 3.38.444.003,- dengan realisasi sebesar Rp 3.304.469.718,- atau persentasinya 98,98% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pembangunan
Tahun 2022

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | % |
| | BELANJA DAERAH | 3.338.444.003 | 3.304.469.718,- | 98,98 |
| I | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | 1.134.861.003,- | 1.126.714.658,- | 99,28 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.988.000,- | 37.927.500,- | 99,84 |
| 1.a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.475.000,- | 21.433.000,- | 99,80 |
| 1.b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.513.000,- | 16.494.500,- | 99,89 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 75.285.000,- | 75.253.000,- | 99,96 |
| 2.a | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 62.225.000,- | 62.225.000,- | 100 |
| 2.b | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 13.060.000,- | 13.028.000,- | 99,75 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 18.800.000,- | 18.800.000,- | 100 |
| 3.a | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.800.000,- | 18.800.000,- | 100 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 45.339.600,- | 45.277.900,- | 99,86 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 4.a | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 45.339.600,- | 45.277.900,- | 99,86 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 736.531.203,- | 734.227.384,- | 99,69 |
| 5.a | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 128.845.910,- | 128.000.000,- | 99,34 |
| 5.b | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.062.290,- | 39.062.290,- | 100 |
| 5.c | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.369.500,- | 18.369.500,- | 100 |
| 5.d | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.200.000,- | 4.201.000,- | 80,79 |
| 5.e | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 545.053.503,- | 544.594.594,- | 99,92 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 35.600.000,- | 34.890.000,- | 98,01 |
| 6.a | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | 35.600.000,- | 34.890.000,- | 98,01 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 75.887.850,- | 72.815.366,- | 95,95 |
| 7.a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 74.386.350,- | 72.815.366,- | 97,89 |
| 7.b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.501.500,- | 0.00,- | 0,00 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 109.429.350,- | 107.523.508,- | 98,26 |
| 8.a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan | 49.190.000,- | 47.718.800,- | 97,01 |
| 8.b | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 47.774.350,- | 47.339.708,- | 99,09 |
| 8.c | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.465.000,- | 12.465.000,- | 100 |
| II | KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2.203.583.000,- | 2.177.755.060,- | 98,83 |
| 1 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.355.758.500,- | 1.341.416.286,- | 98,94 |
| 1.a | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 329.785.000,- | 322.658.655,- | 97,84 |
| 2.b | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 319.295.500,- | 317.742.363,- | 99,51 |
| 3.c | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 706.678.000,- | 701.015.268,- | 99,20 |
| 2 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 847.824.500,- | 836.338.774,- | 98,65 |
| 2.a | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan | 105.820.500,- | 104.565.827,- | 98,81 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | Daerah | | | |
| 2.b | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 482.835.000,- | 479.966.155,- | 99,41 |
| 2.c | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 259.169.000,- | 251.806.792,- | 97,16 |

Sumber : Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022

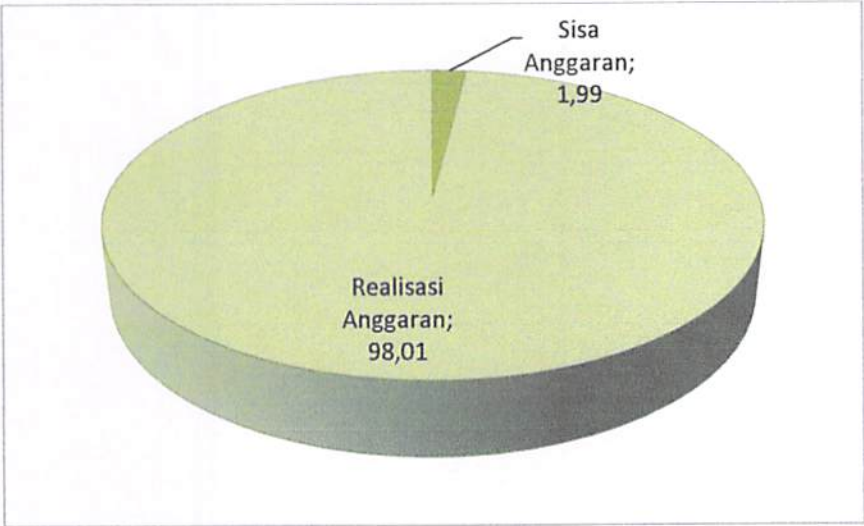
Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, 8 kegiatan merupakan kegiatan rutin Biro Administrasi Pembangunan dan 2 kegiatan merupakan tugas pokok dan fungsi biro. Adapun realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table dan grafik dibawah ini :

Tabel 2
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Total Belanja Daerah | 1.678.058.510 | 1.644.626.760 | 98,98 |
| 1. | Belanja Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.134.861.003 | 1.126.714.658 | 99,28 |
| 2. | Kebijakan Administrasi Pembangunan | 2.203.583.000 | 2.177.755.060 | 98,83 |

Sumber Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022

Persentase Realisasi Anggaran



Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan selama tahun 2022.

Program dan Kegiatan

A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 8 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.134.861.003 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Rupiah) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Adminsitasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun uraian realisasi kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 37.988.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.927.500,- (99,84%).

a. Output

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Outcomes

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah

c. Permasalahan dan Solusi

- Nihil

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 75.285.000,- dan realisasi sebesar Rp.75.253.000,- (99,96%)

a. Output

Terlaksananya tertib administrasi keuangan

b. Outcome

Terwujudnya tertib administrasi keuangan

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

- 3) Adminsitasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 18.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.800.000,- (100%)

a. Output

Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah

b. Outcomes

Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah

c. Permasalahan dan Solusi

Nihil

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 45.339.600,- dan realisasi sebesar Rp. 45.277.900,- (99,86%)

a. Output

Terlaksananya administrasi kepegawaian Biro Administrasi Pembangunan

b. Outcomes

Terwujudnya administrasi kepegawaian Biro Administrasi Pembangunan

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 736.531.203,- dan realisasi sebesar Rp. 734.227.384,- (99,69%)

a. Output

Terlaksananya administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan

b. Outcomes

Terwujudnya administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

6) Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 35.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.890.000 (98,01%)

a. Output

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

b. Outcomes

Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 75.887.850,- dan realisasi sebesar Rp. 72.815.366 (95,95%)

a. Output

Terlaksananya penunjang urusan kantor

b. Outcomes

Terwujudnya penunjang urusan kantor

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 109.429.350,- dan realisasi sebesar Rp. 107.523.508,- (98,26%)

a. Output

Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

b. Outcomes

Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

c. Permasalahan dan solusi : Nihil

B. Kebijakan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.203.583.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Ratus Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 1.355.758.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.341.416.286,- (98,94%)

a. Output

Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat

b. Outcomes

Tersedianya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota dan dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat

c. Permasalahan dan solusi

- Adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian bobot terhadap realisasi fisik maupun realisasi keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- Masih kurang partisipasi Kabupaten/Kota dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan kepada Biro Administrasi Pembangunan dengan menggunakan aplikasi Simbangda.
- Sulitnya memberi pemahaman kepada KPA/PPTK terhadap pentingnya administrasi kegiatan yang akan mempengaruhi penyediaan evidence oleh operator SKPD dalam menginput ke aplikasi SBE.
- Masih banyaknya sektor-sektor yang belum terfasilitasi sehingga pekerjaan banyak yang terbengkalai karena terjadinya refocusing anggaran.

2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 847824.500,- dan realisasi sebesar Rp. 836.338.774,- (98,65%)

d. Output

Tersedianya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat

e. Outcomes

Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat

f. Permasalahan dan solusi

- SKPD masih belum terbiasa berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan sehingga pengendalian permasalahan kegiatan terpencar-pencar di beberapa SKPD
- Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam sistem

- 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan pengukuran berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) target indikator kinerja. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut:

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN TAHUN 2021 (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN SKPD TAHUN 2024 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | TINGKA T REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN 2023 | TINGKAT CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 4.01.01.1.01.04 | b | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun | 4 Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.01.06 | c | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun | 3 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 26 dokumen | 26 dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.01.07 | d | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 4 Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.02.02 | a | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | - | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 Orang | 5 Orang | 100% |
| 4.01.01.1.02.04 | b | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 5 dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4.01.01.1.02.07 | c | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun | n/a | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.03.02 | a | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah BMD yang diarsipkan | 4 unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 unit | 4 unit | 100% |
| 4.01.01.1.03.04 | b | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorarnya | 3 orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 orang | 3 orang | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|------------|------|
| 4.01.01.1.03.06 | c | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.05.11 | a | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | 2 kali | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.06.02 | a | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 kali | 32 unit | 10 unit | 10 unit | 100% | 6 unit | 6 unit | 100% |
| 4.01.01.1.06.04 | c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 4 jenis | 4 jenis | 42 jenis | 42 jenis | 100% | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| 4.01.01.1.06.05 | d | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 100% | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| 4.01.01.1.06.06 | e | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 5 dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 jenis | 27 jenis | 100% |
| 4.01.01.1.06.08 | f | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu yang Dilayani | n/a | 160 orang | 378 orang | 378 orang | 100% | n/a | n/a | n/a |
| 4.01.01.1.06.09 | g | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 40 laporan | 200 dokumen | 200 dokumen | 200 dokumen | 100% | 40 dokumen | 40 dokumen | 100% |
| 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 4.01.01.1.07.02 | a | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan | n/a | n/a | 1 unit | 100% | n/a | n/a | n/a |
| 4.01.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.08.01 | a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 400 laporan | 1500 surat | 1500 surat | 100% | 400 surat | 400 surat | 100% |
| 4.01.01.1.08.02 | b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | 100 mbps | 20 mbps | 20 mbps | 100% | 10 mbps | 10 mbps | 100% |
| 4.01.01.1.08.04 | d | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan | 1 Rekening | 3 Rekening | 1 Rekening | 100% | 1 Rekening | 1 Rekening | 100% |
| 4.01.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 5 orang | n/a | n/a | n/a | 5 orang | 5 orang | 100% |
| 4.01.01.1.09.01 | a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.09.02 | b | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.06 | d | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 3 unit | 2 unit | 2 unit | 100% | 3 unit | 3 unit | 100% |
| | | | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 150 Unit | 150 Unit | 150 Unit | 100% | 30 Unit | 30 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------|
| 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD/APBN | 93% | 90% | 91% | 91% | 100% | 92% | 92% | 100% |
| 4.01.08.1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD/APBN | 93% | 90% | 91% | 91% | 100% | 92% | 92% | 100% |
| 4.01.08.1.01.01 | a | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat | 93% | 90% | 91% | 91% | 100% | 92% | 92% | 100% |
| 4.01.08.1.01.02 | b | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN | 93% | 90% | 91% | 91% | 100% | 92% | 92% | 100% |
| 4.01.08.1.01.03 | c | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | 93% | 90% | 91% | 91% | 100% | 92% | 93% | 100% |
| 4.01.08.1.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | - Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Provinsi - Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.08.1.02.01 | a | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 4.01.08.1.02.02 | b | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peambangunan Daerah | 12 laporan | 4 dokumen | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 4.01.08.1.02.03 | c | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 4 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 100% |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|

' - Note : Untuk pengisian kolom 5 sampai dengan 8 dikosongkan dikarenakan adanya perubahan nama program dan kegiatan serta sub kegiatan pada permendagri 90 th 2019 yang disian target dan realisasi mulai tahun 2021 baik bagi biro yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan nomenklatur

Padang, Juli 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

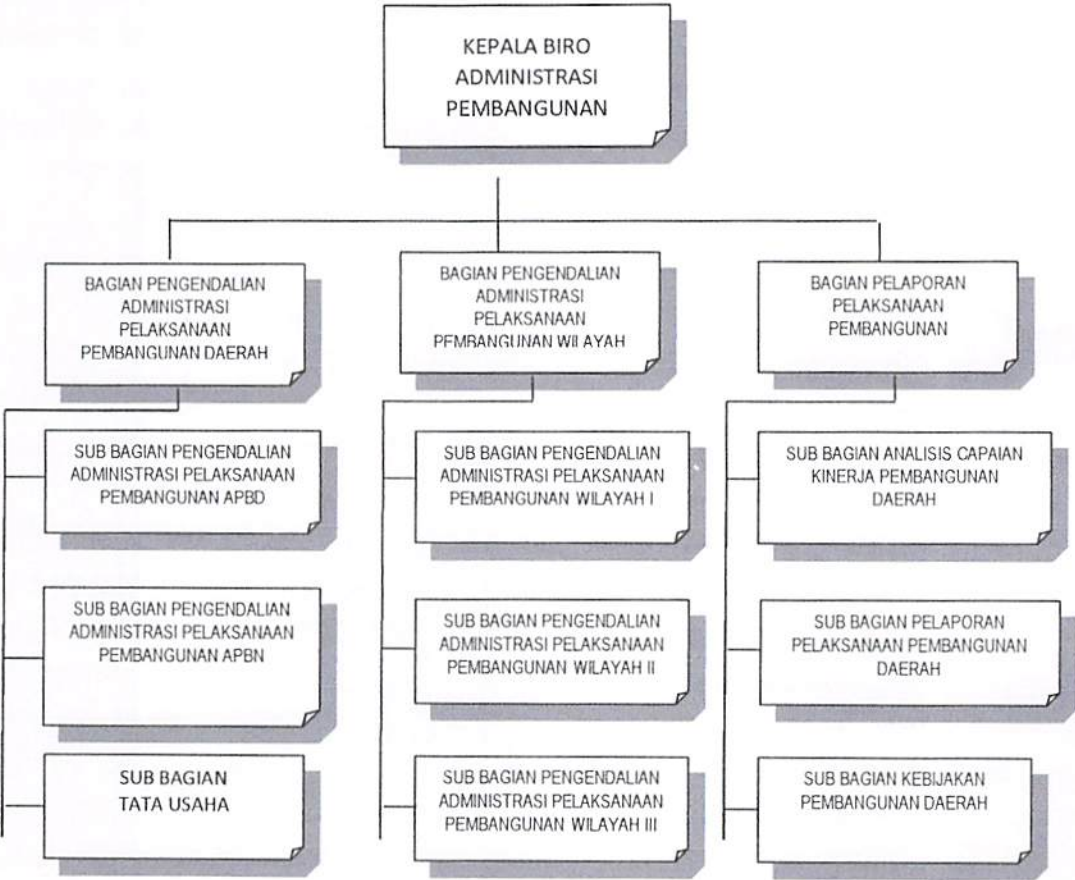
Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si

NIP 19691113 199303 2 002

Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 1 berikut :

Gambar 2.

**Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020)**



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan adalah melaksanakan kegiatan dan juga review terhadap indikator kinerja sesuai dengan struktur organisasi, seperti terlihat pada Tabel T-C.30 :

Tabel T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SPM/ STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (%) | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------|------|------|----------|------|----------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Presentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | - | 90 | 91 | 92 | 93 | n/a | 98 | 98 | 92 | 93 | Proyeksi merujuk pada realisasi capaian tahun 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Padang, Juli 2023
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si
NIP. 19691113 199303 2 002

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah kemajuan teknologi informasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di era demokrasi dimana rakyat bebas, aktif, jujur, adil dan terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemahaman SDM terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi
- b. Belum Optimalnya Dokumen Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 5 Tahun (RENSTRA) sehingga belum sesuai antara Renja Kerja (Renja) Biro-Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Belum optimalnya pengawasan internal PPTK terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikator Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada TC 31 sebagai berikut:

| No | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (YANG SEHARUSNYA UNTUK TAHUN 2024) | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 3.653.323.075 |
| | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Padang | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100,00 | 1.526.561.075 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Provinsi Sumbang | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100,00 | 1.378.252.136 |
| | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Padang | Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100,00 | 176.370.000 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Sumbang | Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik | 100,00 | 173.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Padang | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 11 DOK | 100.000.000 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Sumbang | Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara | 2 DOK | 100.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Padang | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun | 4 DOK | 35.000.000 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah | Provinsi Sumbang | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 4 DOK | 23.000.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 41.370.000 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Sumbang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 DOK | 50.000.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | 100,00 | 77.060.000 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | 100,00 | 74.420.000 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Padang | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | 5 ORG | - | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Padang | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | 5 ORG | 66.420.000 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian ? Verifikasi Keuangan SKPD | 2 DOK | 69.060.000 | | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Padang | Jumlah Dokumen Aktansi SKPD yang disusun | 15 DOK | 8.000.000 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disiapkan | Padang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disiapkan | 2 DOK | 8.000.000 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100,00 | 35.000.000 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100,00 | 24.500.000 |
| | Pengamanan a Barang Milik Daerah SKPD | Padang | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah | 3 DOK | 20.000.000 | | Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Padang | Jumlah BMD yang diasuransikan | 4 UNIT | 20.000.000 |
| | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5.000.000 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah | | 10.000.000 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Padang | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah | 2 DOK | 4.500.000 |
| | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 100,00 | 22.800.000 | | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 100,00 | 22.800.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Padang | Jumlah mengikuti Bimtek/sosialisasi/work shop dan sejenisnya | 8 KALI | - | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Padang | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | 2 KALI | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| | Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Padang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 22.800.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100,00 | 805.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Padang | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 6 Paket | 60.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Padang | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 4 JENIS | 75.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Padang | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 JENIS | 20.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Padang | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan | 5 JENIS | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Padang | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 400 DOK | 650.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan | 100,00 | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Padang | Kendaraan Bermotor roda 2 | 1 unit | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 9.867.625 | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 9.867.625 | |
| | Pengadaan Mebel | Padang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 1.867.625 | Pengadaan Mebel | Padang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket 1.867.625 |
| | Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya | Padang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 8.000.000 | Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya | Padang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit 8.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100,00 | 140.660.764 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100,00 140.162.136 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Padang | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 100% | 5.008.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Padang | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 400 SURAT 5.008.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 5 Orang | 135.652.764 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| | KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Sumbang / Luar Sumbang | Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD | 91% | 2.126.762.000 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Provinsi Sumbang | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100,00 | 2.275.070.939 |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Sumbang / Luar Sumbang | Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab./Kota, dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat | 1 tahun | 1.117.884.000 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Sumbang / Luar Sumbang | 1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat | 93% | 1.375.203.314 |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Sumbang / Luar Sumbang | Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Rapat-rapat Pengendalian | 1 tahun | 339.608.500 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Sumbang / Luar Sumbang | 1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbang, 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbang | 93% | 375.907.814 |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Sumbang / Luar Sumbang | Pelaksanaan Koordinasi (DAK dan APBN), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (DAK, TP, Dekon dll terkait Pembangunan bersumber dari APBN), Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi, Rapat-rapat Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan APBD (DAK, TP, Dekon, dll terkait Pembangunan bersumber dari APBN), Rapat-rapat Pengendalian dan | 1 tahun, 1 tahun, 2 kali, 1 tahun, 1 tahun | 345.995.500 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Sumbang / Luar Sumbang | 1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN, 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN | 93% | 399.295.500 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan Tahun 2024, indikator kinerja yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat, seperti disajikan pada Tabel T-C.32 berikut :

TABEL T.C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN
2024
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama OPD : Biro Administrasi
Pembangunan

| No. | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATO R KINERJA | BESARAN/ VOLUME |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Provinsi Sumbar |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------|



Padang, Juli 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si
NIP. 19691113 199303 2 002

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka arah kebijakan pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

- a. Penciptaan Birokrasi efektif dan efisien
- b. Penciptaan Birokrasi yang melayani
- c. Penciptaan Birokrasi bersih dan akuntabel

Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu *"membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan"*.

Adapun Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (TUJUAN DI RENSTRA)

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan misi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan visi daerah yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada visi ketujuh RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**

Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kepada Misi 7 yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** “ dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

| No | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tujuan : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan apratur yang melayani | Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel | Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah |

TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2026

Table 3. 1

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan | | Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Tertib dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| | Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal | | | | | | | |
| Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B (60,08) | B (63) | B (66) | B (69) | BB (71) | BB (74) |
| | | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi | B | B (64) | B (67) | B (70) | BB (72) | BB (75) |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi | B (60,08) | B (63) | B (66) | B (69) | BB (71) | BB (74) |
| | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi | B | B (64) | B (67) | B (70) | BB (72) | BB (75) |

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Biro Amdinistrasi Pembangunan untuk pelaksanaan kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pembangunan yang berupa dilingkup Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan bukan merupakan Program Unggulan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan hanya sebagai penunjang urusan Skeretarait Daerah sehingga Biro Administrasi Pembangunan secara langsung tidak mempengaruhi kebijakan daerah dalam pelaksanaan kegiatannya.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2023, Renja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Namun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu *membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*”, maka dukungan Biro Administrasi Pembangunan dalam pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2024 adalah memfasilitasi semua kegiatan pelaksanaan pengendalain administarsi pembangunan.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci Biro Administrasi Pembangunan adalah “ *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (%)* “

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan maka didukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi. Adapun pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan yang disusun tersebut adalah:

1. Serasi dan selaras dengan program prioritas nasional dan daerah
2. Sesuai dengan tema pembangunan daerah
3. Mendukung arah kebijakan nasional dan daerah

Berdasarkan rumusan di atas maka program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024, seperti terlihat pada Tabel T-C.33 :

TABEL T-C.33.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama OPD : Biro Administrasi Pembangunan

| KODE | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | | RENCANA TAHUN 2024 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026) | |
|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | | Padang | 100% | 2.482.179.600 |
| 4 | 01 | 01 | 1 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | | Padang | 100% | 134.478.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 01 | a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | | Padang | 2 dokumen | 60.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 01 | b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD | | Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun | | Padang | 3 dokumen | 35.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 01 | c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | | Padang | 4 Dokumen | 39.478.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | Padang | 100% | 319.586.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 02 | a Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi keuangan perangkat daerah | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | Padang | 5 dokumen | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 07 | b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan | Padang | 2 dokumen | 119.586.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Padang | 100% | 35.480.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | a | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah BMD yang diasuransikan | Padang | 4 unit | 25.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | 06 | b | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | Padang | 2 dokumen | 15.480.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Padang | 100% | 120.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 05 | 11 | a | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendididkan dan pelatihan yang dilaksanakan | Padang | 2 kali | 120.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Padang | 100% | 1.133.260.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | a | Penyediaan Peralatan dan perlegkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Padang | 2 kali | 100.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | b | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | Padang | 4 jenis | 100.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 05 | c | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Padang | 5 jenis | 50.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 06 | d | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | Padang | 5 dokumen | 25.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 09 | e | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | Padang | 40 laporan | 858.260.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Padang | 100% | 320.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | 01 | a | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang di sediakan | Padang | 2 Paket | 120.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | 04 | b | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jasa Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | Padang | 6 Unit | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | 100% | 234.671.600 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 01 | a Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | Padang | 400 laporan | 50.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 04 | b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | Padang | 5 orang | 184.671.600 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | Padang | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | 184.704.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 01 | a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara | Padang | Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara | - |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 02 | b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Padang | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 159.704.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 06 | c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Padang | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 25.000.000 |
| 4 | 01 | 08 | | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD/APBN | Provinsi Sumbar | 93% | 8.817.048.000 |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan | Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD/APBN | Provinsi Sumbar | 93% | 5.237.837.600 |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 01 | 01 | a Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumbar | 93% | 2.027.300.000 |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 01 | 02 | b Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN | Provinsi Sumbar | 93% | 1.353.048.000 |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 01 | 03 | c Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | Provinsi Sumbar | 93% | 1.857.489.600 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 4 | 01 | 08 | 1 | 02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | - Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Provinsi | Provinsi Sumbar | 100% | 3.579.210.400 |
| | | | | | | | - Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target | | | |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 02 | 01 | a | Jumlah dokumen hasil capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan | Provinsi Sumbar | 4 dokumen | 1.149.466.800 |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 02 | 02 | b | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Sumbar | 12 laporan | 1.550.500.000 |
| 4 | 01 | 08 | 1 | 02 | 03 | c | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Provinsi Sumbar | 2 dokumen | 879.243.600 |

Catatan : Pengisian Tabel ini berdasarkan hasil Tabel T-B.36

Berdasarkan Tabel T-C.33 tersebut diatas bahwa untuk tahun 2024 sebagai penunjang pekerjaan pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang sudah tercantum sesuai dengan Renstra 2021-2026, dan perkiraan penunjang kegiatan di tahun 2024 masih sama jumlah program dan kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 mempunyai 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.610.893.000 jumlah anggaran dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOL UME | RENCANA PENDANAAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | BELANJA | | | | 3.653.323.075 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 1.328.252.136 |
| 1 | Perencanaan,Peng anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Padang | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | 85% | 173.000.000 |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Padang | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 2 dokumen | 100.000.000 |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah | Kota Padang | Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA, SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun | 4 dokumen | 23.000.000 |
| 1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Padang | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 4 dokumen | 50.000.000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Padang | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 74.420.000 |
| 2.1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Padang | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | 5 dokumen | 66.420.000 |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD | Kota Padang | Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran yang disiapkan | 2 dokumen | 8.000.000 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kota Padang | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 36.500.000 |
| 3.1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Padang | Jumlah BMD yang diasuransikan | 4 dokumen | 20.000.000 |
| 3.2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Padang | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 2 laporan | 4,500,000 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Padang | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 22.800.000 |
| 4.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Padang | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 4 Orang | 22.800.000 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Padang | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 805.000.000 |
| 5.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Padang | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 6 paket | 60.000.000 |
| 5.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Padang | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 4 paket | 75.000.000 |
| 5.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota Padang | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 paket | 20.000.000 |
| 5.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Padang | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 40 laporan | 650.000.000 |
| 6 | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Padang | Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 9.867.625 |
| 6.1 | Pengadaan Mebel | Kota Padang | Jumlah pengadaan mebel yang disediakan | 2 Paket | 1.867.625 |
| 6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Padang | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 3 Unit | 8.000.000 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Padang | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 140.162.136 |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Padang | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 400 laporan | 5.008.000 |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Padang | Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 5 laporan | 135.154.136 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Padang | Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik | 100% | 138.370.000 |
| 8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Padang | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 unit | 116.790.000 |
| 8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Padang | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 25 unit | 21.580.000 |
| B | PROGGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Sumbar/Luar Sumbar | Persentase realisasi fisik dan keuangan | 92% | 2.275.070.939 |
| 9 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Sumbar/Luar Sumbar | Persentase realisasi fisik dan keuangan | 92% | 1.385.070.939 |
| 9.1 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Sumbar/Luar Sumbar | Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD | 20 laporan | 385.775.439 |
| 9.2 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Sumbar/Luar Sumbar | Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD | 30 laporan | 399.295.500 |
| 9.3 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Sumbar/Luar Sumbar | Persentase realisasi fisik dan keuangan Kab/Kota | 30 laporan | 600.000.000 |
| 10 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Sumbar/Luar Sumbar | Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik | 100% | 890.000.000 |
| 10.1 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Sumbar/Luar Sumbar | Terlaksananya analisis capaian kinerja Pembangunan Daerah | 4 dokumen | 150.000.000 |

| | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 10.2 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Sumbar/Luar Sumbar | Percepatan penyerapan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan daerah | 12 laporan | 400.000.000 |
| 10.3 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Sumbar/Luar Sumbar | Kebijakan teknis yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah | 2 dokumen | 340.000,000 |

BAB V

PENUTUP

Recana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan turunan dari Review Rencana Strategis (Renstra) Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan jangka pendek daerah yang sudah dirancang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2024.

Dalam penyusunan Renja, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait masalah pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Renja sedapat mungkin mengupayakan adanya harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Pada Renja 2024 terdapat program/kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilakukan pengentiran pada Aplikasi SIPD RI yang akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan untuk tahun 2024. Kondisi tersebut bertujuan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024 sehingga dapat terwujudnya optimalisasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

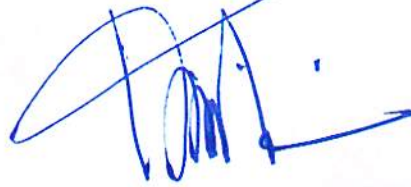
Untuk mengatasi hal tersebut Biro Administrasi Pembangunan sudah mengusulkan kebutuhan anggaran dan programkegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja 2024 diharapkan usulan tesebut dapat direalisasikan sehingga target realisasi fisik dan keuangan dan tercapai dengan maksimal.

Sementara itu harapan dari Renja ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, Juli 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19691113 199303 2 002